

## BAB IV

### PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

#### A. Paparan Data

##### 1. Profil MAN 2 Pamekasan

- a. Nama Madrasah : MAN 2 Pamekasan
- b. Status : Unggulan & Reguler
- c. Nomor Telp/Fax : 0324-332212
- d. Alamat : Jl. KH. Wahid Hasyim No.  
28 Barurambat Timur
- e. Kecamatan : Pademawu
- f. Kabupaten/Kota : Pamekasan
- g. Kode Pos : 69321
- h. Tahun Berdiri : 1958 (PGAN 6 Tahun)  
Berubah MAN 19992
- i. Program Yang Diselenggarakan : IPA & IPS

##### 2. Sejarah Singkat Berdirinya MAN 2 Pamekasan

Sebelum berubah menjadi Madrasah Aliyah Negeri Pamekasan, lembaga ini terlebih dahulu dikenal dengan sebutan PGAN Pamekasan yang dibangun pada tahun 1956. Pembangunan awal ini sudah difasilitasi dengan 18 ruang belajar, 1 ruang kantor (Kepala TU, Gudang), 1 ruang perpustakaan, 1 aula, 15 kamar mandi, 1 ruang penjaga, 7 gedung asrama, 1 masjid, lapangan sepak bola, dan lapangan bola voli dengan luas 28.640 m<sup>2</sup>.

Pada tahun 1959 secara resmi digunakan sebagai tempat kegiatan belajar mengajar dengan siswa atau peserta didik dari seluruh wilayah Madura dan sekitarnya. Diresmikan sebagai PGAN pada tahun 1963 selama 6 tahun lalu setelahnya dirubah dan digabung menjadi MTs Negeri selama 4 tahun.

Pada tahun 1992, PGAN dirubah atau dialih fungsi menjadi Madrasah Aliyah Negeri 2 Pamekasan (MAN 2 Pamekasan) dengan berdasarkan SK Kandepag nomor: 42 tanggal 27 Januari. Kemudian pada tahun 2017 berubah menjadi MAN 2 Pamekasan sampai saat ini.

### **3. Visi**

“Cerdas, trampil, berakhlaqul karimah dan peduli lingkungan”.

Indikator:

- a. Terwujudnya siswa yang cerdas dengan peningkatan prestasi akademik dan non akademik.
- b. Terwujudnya siswa yang terampil dalam bidang IT, Budaya Lokal Batik.
- c. Terwujudnya peningkatan ibadah dan keimanan siswa kepada Tuhan yang Maha Esa.
- d. Terwujudnya siswa yang berakhlaqul karimah.
- e. Terwujudnya karakter siswa yang peduli terhadap pelestarian lingkungan.
- f. Terwujudnya budaya pengendalian dan pencegahan kerusakan lingkungan.
- g. Terwujudnya Madrasah Adiwiyata.

#### 4. Misi

- a. Meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik.
- b. Meningkatkan bimbingan belajar yang intensif.
- c. Meningkatkan sarana penunjang pendidikan.
- d. Mengembangkan PBM yang efektif, inovatif, kreatif dan demokratis.
- e. Mengembangkan Program Bengkel Sholat.
- f. Mewujudkan kebiasaan membaca ayat suci Al Qur'an tiap memulai pelajaran.
- g. Meningkatkan bimbingan ekstra kurikuler seni dan olahraga.
- h. Menerapkan prinsip dan nilai-nilai islam dalam kehidupan sehari-hari.
- i. Meningkatkan pembelajaran siswa dalam bidang informatika dan ketrampilan siswa dalam seni membatik.
- j. Mewujudkan budaya bersih dan sehat pada semua warga madrasah dengan pengembangan UKS.
- k. Mewujudkan penghijauan dan pengaturan taman di lingkungan madrasah.
- l. Mewujudkan perlindungan dan pelestarian fungsi lingkungan dan membudayakan perilaku menghindari kerusakan lingkungan.
- m. Mewujudkan perilaku mencegah dan menghindari pencemaran lingkungan dengan pengolahan limbah

## 5. Tujuan

Dengan berpedoman pada visi dan misi yang telah dirumuskan serta kondisi di madrasah, maka tujuan madrasah yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan peserta didik yang bertaqwa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia.
- b. Menyiapkan peserta didik yang unggul dalam prestasi akademik dan non akademik agar mampu bersaing dan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
- c. Menyiapkan peserta didik agar menjadi manusia yang berkepribadian, cerdas, berkualitas dan berprestasi dalam bidang olahraga dan seni.
- d. Membekali peserta didik agar memiliki keterampilan teknologi informasi serta mampu mengembangkan diri secara mandiri.
- e. Meningkatkan ketrampilan siswa yang mampu melestarikan kearifan dan budaya lokal.
- f. Menciptakan sikap ulet dan gigih peserta didik dalam berkompetisi dan mengembangkan sikap sportifitas.
- g. Menciptakan dan meningkatkan sikap dan mental siswa yang peduli pada pelestarian lingkungan.
- h. Menciptakan lingkungan madrasah yang bersih dan sehat.
- i. Menciptakan lingkungan madrasah yang rindang.

- j. Menciptakan sikap peduli siswa pada kelestarian alam dan energi.
- k. Menciptakan pola hidup sehat warga madrasah

## **6. Pengelolaan Anggaran Sekolah Dengan *Good School Governance* di MAN 2 Pamekasan**

Sekolah dituntut untuk melaksanakan pengelolaan sekolah secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja sekolah dalam pencapaian tujuan pendidikan, yang hasilnya bisa dilihat dari kinerja yang berhasil dicapai oleh sekolah. Berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan oleh Ibu Desi selaku bendahara menyatakan, bahwa:

“Sekolah memang seharusnya melaksanakan pengelolaan atau manajemen dengan baik, akan setiap kegiatan yang menjadi pengelolaan disekolah itu mendapatkan keberhasilan. Keberhasilan sekolah itu dilihat juga dari beberapa prestasi disekolah ini, seperti sekolah mendapatkan hasil predikat A atas akreditasi. Dan ada juga beberapa prestasi yang diperoleh sekolah, seperti sekolah menyandang predikat sekolah adiwiyata. Itu merupakan suatu tingkat keberhasilan sekolah jika dilihat dari pengelolaan sekolah. Makanya manajemen disekolah itu harus benar-benar efektif dan efisien agar bisa mendapatkan hasil yang di capai.”<sup>40</sup>

Dari pernyataan di atas yang telah dikemukakan bahwa sekolah telah melakukan pengelolaan atau telah memanajemen dengan baik bukti dari pengelolaan sekolah yang baik sekolah telah mencapai sebuah tujuannya yaitu dengan mendapatkan predikat A dalam penilaian akreditas sekolah, dan juga sekolah menyandang predikat sebagai sekolah adiwiyata. Maka menurut narasumber menyatakan, pengelolaan sekolah yang baik apabila pihak pengelola dapat

---

<sup>40</sup> Ibu Desi, *Wawancara Langsung*, 08 April 2022.

memanajemen sekolah dengan efektif dan seefisien mungkin agar tujuan sekolah tercapai.

Hal ini dilanjutkan lagi dengan pernyataan yang telah disampaikan oleh Bapak Hasirullah selaku Kepala Tata Usaha, hasil wawancara yang telah dilakukan bahwa :

“*Good School Governance* di sekolah itu kan merupakan penataan pengelolaan sekolah sesuai standart peraturan kan. Kalau menurut saya sekolah ini telah memenuhi standart peraturan pengelolaan sekolah dengan baik buktinya sekolah sudah mendapatkan predikat A atas penilaian akreditasi sekolah. Secara aturan, sekolah telah memberakukan standart atau aturan yang dibuat pemerintah. Baik peraturan untuk pengeolaan, tenaga pendidik, gedung, proses kegiatan belajar mengajar, ekstrakurikuler dan lainnya semua sudah mengikuti aturan. Makanya semuanya sudah dinilai sehingga tidak ada satupun terlewatkan. Sehingga memenuhi standart penilaian dan mendapat kriteria A untuk akreditasi.”<sup>41</sup>

Berdasarkan pernyataan Bapak Hasirullah di atas dapat diketahui bahwa penerapan *Good School Governance* atau yang biasa disebut dengan tata kelola sekolah baik telah dilaksanakan oleh sekolah. Hal ini dibuktikan dengan adanya penilaian akreditasi, sekolah telah mendapatkan predikat A. penilaian akreditasi ini adalah penilaian yang dilakukan di sekolah dengan menilai kesesuaian standart peraturan pemerintah dengan keadaan di sekolah. Penilaian yang dilakukan ini merupakan semua item indikator sekolah baik secara internal maupun eksternal sekolah. Maka hal ini dinyatakan sekolah telah memenuhi standart peraturan pemerintah tentang pengelolaan sekolah dengan baik.

---

<sup>41</sup> Bapak Hasirullah, *Wawancara Langsung*, 08 April 2022 .

Hal ini ditambahkan dan diperjelas oleh pernyataan Bapak Andi selaku guru di MAN 2 Pamekasan yaitu:

“Sekolah telah melaksanakan pengelolaan secara mengadministrasikan sekolah dengan bagus. Hal ini dibuktikan saat penilaian akreditasi itu. Pengadministrasian itu lebih banyak dilaksanakan di bagian tata usaha sekolah. Saya sebagai guru menyatakan adminitrasi sudah tertata bagus, baik dibidang keuangan semua keuangan tercatat dengan rapi dan dari bukti pengeluaran keuangan sudah sesuai dengan bukti fisik dan dana anggraan. Administrasi perpustakaan itu juga suda terkelola bagus. Apalagi masalah pengelolaan bangunan sekolah ini sekarang saja dalam masa tahap pengelolaan. Selebihnya bisa ditanyakan ke kepala sekolah.”<sup>42</sup>

Hasil wawancara selanjutnya ditambahkan oleh Bapak Ahmad Wahyudi selaku Kepala Sekolah atau sebagai manajer dari sekolah, yang memiliki kekuasaan tertinggi atas sekolah, meyakini bahwa :

“Untuk mengatakan sistem pengelolan yang baik itu bukan sekolah yang menentukan, baik atau tidaknya sekolah sudah melaksanakan pengelolaan sesuai dengan regulasi yang berlaku, regulasi ini yang mengeluarkan bisa oleh dirjen anggaran, Kementrian Agama Prov, bisa dari Kementrian Agama Pusat, karena untuk pengelolaan sekolah itu sekarang sudah mengacu pada sisitem komputerisasi/ menggunakan aplikasi semua dan tidak mungkin pengelolaan sekolah tidak berdasarkan aturan.”<sup>43</sup>

Berdasarkan pernyataan dari kepala sekolah di atas dinyatakan bahwa penilaian pengelolaan sekolah bukan dari sekolah yang menentukan, melainkan pembuat regulasi yang menentukan, diantaranya dirjen anggatan, dari kementerian agama provinsi, dan dari kementerian agama pusat. Pengelolaan sekolah sekarang sudah menggunakan sistem secara komputerisasi atau bisa disebut aplikasi

---

<sup>42</sup> Bapak Andi, *Wawancara Langsung*, 15 April 2022.

<sup>43</sup> Bapak Ahmad Wahyudi, *Wawancara Langsung*, 15 April 2022.

yang dibuat oleh pemerintah. Sehingga semua pengelolaan sudah sesuai dengan regulator atau aturan pemerintah.

Pengelolaan sekolah diantaranya ada pengelolaan administrasian sekolah. Dalam pengelolaan sekolah hal yang paling menjadi resiko terbesar adalah pengelolaan anggaran sekolah. Bapak Hasirullah selaku Kepala Tata Usaha yang menangani anggaran sekolah, menyatakan bahwa:

“Namanya anggaran, hal yang harus kita buat secara rinci apa saja yang menjadi kebutuhan sekolah untuk masa satu tahun mendatang. Hal yang menjadi tanggung jawab terbesar dan yang memiliki resiko tinggi yaitu pengelolaan anggaran. Anggaran itu merupakan pengelolaan dana dari pemerintah yang harusnya kita kelola untuk memnuhi kebutuhan sekolah, baik untuk pemenuhan sarana, prasarana, administrasi dan kegiatan belajar mengajar disekolah ini. Namanya juga uang yang harusnya benar dikelola dengan baik. Karena jumlah anggran sekolah ini sangatlah tinggi.”<sup>44</sup>

Pernyataan di atas menyatakan bahawa pengelolaan anggaran merupakan pengelolaan yang menjadi tanggung jawab besar dan memiliki resiko tinggi . hal ini dikarenakan jumlah anggaran sekolah ini sangatlah besar, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah diantaranya pemenu kebutuhan sarana dan prasarana, administrasi sekolah dan kegiatan belajar mengajar yang akan dilaksanakan disekolah pada periode satu tahun mendatang. Anggaran sudah harus dibuat sebelum tahun anggaran terlaksana, semua kebutuhan sekolah harus terpenuhi.

---

<sup>44</sup> Bapak Hasirullah, *Wawancara Langsung*. 08 April 2022



Bapak Ahmad Wahyudi selaku kepala sekolah juga menambahkan pernyataan mengenai anggaran, bahwa:

“Sekarang anggaran sekolah itu semua dari keuangan pemerintah yang sumbernya berasal dari dana Bantuan operasional sekolah. Dan semua dana BOS yang dikucurkan kesetiap sekolah menjadi tanggung jawab pemerintah. Dan salah satu sumber keuangan dana anggaran sekolah itu. Tidak ada lagi dari komite maka mau tidak mau sekolah harus memanage keuangan itu supaya bisa cukup, artinya walaupun kurang tetap tidak bisa mengusulkan kekurangannya.”<sup>45</sup>

Berdasarkan pernyataan yang dikemukakan siatas menyatakan bahwa anggaran sekolah yang merupakan anggran pendapatan dan belanja sekolah itu, sumber dana anggaran yaitu hanya dari sumber yaitu dari sumber dana Bantuan Operasional Sekolah. Dana Bantuan Operasional sekolah tersebut diberikan kepada sekolah untuk dikelola dan menjadi tanggung jawab sekolah sepenuhnya. Sekolah harus mampu mengelola dana operasional sekolah efektif dan efisien mungkin. Agar besaran usulan dana anggaran yang telah diusulkan yang turunya berupa dan bantuan operasional sekolah harus mampu di gunakan sepenuhnya atau realisasi penuh. Untuk mengetahui tingkat kinerja dari anggaran sekolah.

Sekolah harus melakukan pengelolaan anggaran dana sekolah sesuai dengan standart peraturan pemerintah sehingga sekolah bisa dikatakan dengan sekolah menerapkan *Good School Governance* atau biasa dikatakan sekolah sebagai tata kelola baik dalam pengelolaan anggaran

---

<sup>45</sup>Bapak Ahmad Wahyudi, *Wawancara Langsung 15 April 2022*.

sekolah. Bapak Ahmad Wahyudi selaku Kepala Sekolah menyatakan tentang pengelolaan dan anggaran sekolah, sebagai berikut ini:

“Pengelolaan anggaran saya rasa sudah memenuhi standart yang tadi disebutkan sebagai *good school governance* atau tata kelola sekolah itu. Karena sekolah dalam pengelolaan anggaran sudah menggunakan aplikasi atau sistem semua dan tidak mungkin keuangan itu dikelola tidak berdasarkan aturran. Kalau sudah tidak mematuhi stndart seudah buyar artinya pengelolaan keuangan itu sudah baku mau tidak mau harus mengikuti aturan yang sudah berlaku sesuai standart.”<sup>46</sup>

Pernyataan di atas dapat dijelaskan bahwa pengelolaan anggaran keuangan sekolah sudah sesuai standart *Good School Governance*. Karena sistem keuangan yang berlaku didalam sekolah sudah diatur oleh pemerintah yaitu menggunakan aplikasi komputerisasi. Dapat disimpulkan semua keuangan sudah sesuai dengan standart regulasi pemerintah.

Sejalan dengan pernyataan yang dinyatakan oleh Bapak Hasirullah selaku Kepala Tata Usaha, telah menyatakan bahwa:

“Sekolah selalu mengikuti aturan tentang prosedur pengelolaan keuangan yang sudah baku, artinya anggaran sekolah itu sudah ada namanya masing masing misal, 1 milyar untuk gaji guru, 1 milyar untuk gedung dll. Sekolah hanya menjalankan pengelolaan disitu saja kecuali memang ada sesuatu anggaran 2021 yang tidak memungkinkan untuk dikerjakan baru direvisi contoh anggaran untuk ekstrakurikuler tetapi beberapa tahun ini tidak boleh mengadakan kegiatan jadi anggarannya diahlihan untuk pengadan handsanitizer dan tempat cuci tangan.”

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dijabarkan bahwa sekolah telah mengikuti prosedur pengelolaan keuangan yang sudah baku sesuai pagu

---

<sup>46</sup> Bapak Ahmad Wahyudi. *Wawancara Langsung*, 15 April 2022

anggaran masing-masing yang telah dianggarkan. Pihak sekolah hanya sebagai pengelola. Semua anggaran sudah sesuai dengan kebutuhan sekolah. Tetapi pada tahun 2021 ada beberapa anggaran yang harus direvisi dikarenakan anggaran yang awalnya di pagukan pada kegiatan ekstrakurikuler, direvisi sesuai pertauran pemerintah, bahwa sekolah tidak boleh melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler selama pandemi COVID 19. Maka anggaran kegiatan ekstrakurikuler digantikan pada anggaran pengadaan handsanitizer.

#### **7. Faktor yang Bisa Menerapkan Good School Governance Untuk Pengelolaan Anggaran Sekolah di MAN 2 Pamekasan**

Setiap sekolah dituntut untuk melaksanakan tata kelola sekolah dengan baik jadi bisa dikatakan sekolah itu sesuai dengan standart *Good School Governance* (GSG) yang merupakan sebuah perangkat pendukung untuk membentuk sebuah sekolah dengan tata kelola yang baik. standart *Good School Governance* (GSG) terdapat tiga prinsip tata kelola sekolah yang baik yaitu *independensi, transparansi, akuntabilitas, responsibility, dan fairness*.

Berdasarkan memperoleh data yang di didapatkan dari sebuah wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan untuk mengetahui tingkat independensi di sekolah, yaitu bapak Hasirullah selaku Kepala Tata Usaha wawancara ini dilakukan disekolah menyatakan bahwa:

“Sekolah secara umum sudah mematuhi peraturan pemerintah sesuai standat, karena kemandirian yang dimaksud disini untuk kemandirian terhadap pembiayaan sekolah. Sekolah sudah

seungguhnya masih belum dikatakan mandiri, karena sekolah masih tergantung pada dan BOS sepenuhnya, sekolah belum memiliki penghasilan sebagai pendapatan sekolah. Jadi dikatakan mandiri tidak”.<sup>47</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas menyatakan bahwa Sekolah sudah mematuhi peraturan pemerintah sesuai standar. Sekolah sudah sepenuhnya masih belum dikatakan mandiri, karena sekolah masih tergantung pada dan BOS sepenuhnya, sekolah belum memiliki pendapatan sekolah. Jadi dapat disimpulkan sekolah sudah melakukan pengelolaan anggaran sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah.

Selain itu Ibu Desi sebagai Bendahara juga menyatakan sama dengan pernyataan di atas yaitu:

“Jika independensi itu mandiri tanpa bantuan orang lain dalam pendanaan, kalau menurut saya belum mandiri karena masih ketergantungan kepada negara yaitu dana BOS, kadang saya sebagai bendahara selalu menalangi keuangan, karena harus ada kegiatan yang harus dilakukan, sedangkan keuangan sekolah yang sumbernya dari BOS belum turun juga, jadi kadang saya sebagai bendahara menalangi dulu bersama kepala sekolah, untuk lancarnya kegiatan di sekolah.”<sup>48</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa sekolah belum mandiri dalam pendanaan, sekolah belum mandiri karena masih ketergantungan kepada negara yaitu dana BOS, sekolah yang sumbernya dari BOS, jika dana BOS belum turun juga, bendahara dan kepala sekolah selalu menalangi dana untuk lancarnya kegiatan di sekolah.

---

<sup>47</sup> Bapak Hasirullah, *Wawancara Langsung*, 08 April 2022.

<sup>48</sup> Ibu Desi, *Wawancara Langsung*, 08 April 2022.

Pernyataan juga sama di jelaskan oleh Bapak Andi selaku guru, bahwa:

“Sekolah belum mandiri karena tergantung pemerintah. Karena ini pelayannya publik yang saya ketahui ini nirlaba jadi tidak bisa mendapatkan keuntungan jadi sekolah masih ketergantungan ke negara. Tidak ada pendapatan yang bisa diperoleh sekolah.”<sup>49</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas sekolah dikatakan belum mandiri karena masih tergantung pemerintah. Karena sekolah merupakan pelayannya publik yang masih tergantung pada pemerintah dan sekolah juga tidk memiliki pendapatan karena bukan waralaba.

Berdasarkan memperoleh data yang di didapatakan dari sebuah wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan untuk mengetahui tingkat transparansi di sekolah, yaitu Bapak Hasirullah sebagai Kepala Tata Usaha wawancara ini dilakukan disekolah menyatakan bahwa:

Saya sebagai kepala tata usaha, transparan ini kan keterbukaan informasi anggaran, jadi klo menurut saya di sekolah ini anggaran dan data realisasi anggrannya, tapi sampai sekarang ini sepengetahuan saya ada dua versi anggaran ada versi publikasi dan privasi. Untuk publikasi itu memng dibuat sesuai dengan realisasi anggran sesuai dengan pagu.<sup>50</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa transparan merupakan keterbukaan informasi anggaran, sekolah sudah merealisasikan anggaran dan data anggrannya, ada dua versi anggaran yaitu versi publikasi dan privasi. Untuk publikasi itu memng dibuat sesuai dengan realisasi sesuai dengan pagu anggaran.

---

<sup>49</sup> Bapak Andi, *Wawancara Langsung*, 15 April 2022.

<sup>50</sup> Bapak Hasirullah, *Wawancara Langsung*, 08 April 2022.

Berdasarkan memperoleh data yang di didapatakan dari sebuah wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan untuk mengetahui tingkat transparansi di sekolah, yaitu Bapak Andi sebagai guru wawancara ini dilakukan disekolah menyatakan bahwa:

“Transaparansi ini disekolah belum juga karena saya sebagi guru disekolah ini belum sepenuhnya tau anggran dan realiasai anggaran yang sesungguhnya sesuai kenyaataannya, karen pihak sekolah ada hal yang sangat introvet terhadap anggaran ini, yang hanya saya ketahui masalah anggaran gaji, sama realisasi. Karena saya hanya penikmat gaji.”<sup>51</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dinyatakan bahwa pihak sekolah sangat tertutup dengan realisasi anggran yang sebenarnya. Pihak guru hanya diberi keterbukaan anggaran pada pengeluaran penggajian. Jadi tidak semua realisasi anggran di publikasikan atau transparan kepada publik.

Berdasarkan memperoleh data yang di didapatakan dari sebuah wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas di sekolah, yaitu Bapak Hasirullah sebagai Kepala tata usaha wawancara ini dilakukan disekolah menyatakan bahwa:

“Saya sebagai kepala TU, meyatakan bahwa sekolah itu sudah bertanggung jawab atas anggran karena pagu dari dan BOS harus dihabiskan. Jika tidak dihabiskan akan terlihat kinerja sekolah jelak, untuk pagu anggran berikutnya akan dikurangi. Maka di sini saya sebagai kepala tata usa menyatakan bahwa anggaran ini sudah sepenuhnya bisa dipertanggung jawabkan sesusai peraturan pemerintah. Jadi sudah terealisasi semua”.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Bapak Andi, *Wawancara Langsung*, 15 April 2022.

<sup>52</sup> Bapak Hasirullah, *Wawancara Langsung*, 08 April 2022.

Berdasarkan pernyataan diatas telah di jabarkan bahwa pihak sekolah telah melaksanakan akuntabilitas sesuai dengan pagu anggaran. Hal ini dapat diketahui dari realisasinya dana bos, karena jika dana bos tidak teralisasi semuanya maka pemerintah menilai kinerja sekolah tidak bagus dan akan mengurangi anggran pada priode berikutnya.

Berdasarkan memperoleh data yang di didapatkan dari sebuah wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas di sekolah, yaitu Ibu Desi sebagai Bendahara wawancara ini dilakukan disekolah menyatakan bahwa:

“Saya menyatakan anggaran yang diusulkan akan mendapatkan dana dari BOS saya sebagai bendahara telah sepenuhnya bertanggung jawab menjalankan seluruh dana yang ada tanpa ada penyelewengan atau korupsi satu pun yang saya perbuat. Jadi saya rasa dana yang telah dianggarkan telah dikeluarkan sesuai dengan pagu anggran yang disusun sekolah. Saya selalu melakukan pengeluaran keuangan sesuai dengan anggaran yang ada. Jika kegiatan itu tidak ada di anggaran maka saya tidak berani mengeluarkan uang.”<sup>53</sup>

Pernyataan dari bendahara diatas menyatkan bahwa pihak bendahara sekolah sebagai pengelola anggran sekolah telah bertanggung jawab atas setiap dana keuangan sekolah. Bendahara juga menyatakn tidak pernah melakukan penyelewengan atas dana tersebut. Bagian bendahara telah melakukan sesuai pekerjaannya yaitu mengeluarkan dana sesuai dengan data di anggaran sekolah.

Berdasarkan memperoleh data yang di didapatkan dari sebuah wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan untuk

---

<sup>53</sup> Ibu Desi, *Wawancara Langsung* 08 April 2022.

mengetahui tingkat akuntabilitas di sekolah, yaitu Bapak Andi sebagai Guru wawancara ini dilakukan disekolah menyatakan bahwa:

“Saya sebagai guru hanya bisa menyatakan mungkin dikatakan dipertanggung jawabkan dengan baik karena sampai sekarang ini belum ada temuan dari pemeriksa yang di utus oleh pemerintah yang biasanya itu BPK yang melakukan pemeriksaan. Klo tanggung jawab ya bisa, tp saya belum tau laporan realisasi, jadi saya belum sepenuhnya menyatakannya”.<sup>54</sup>

Berdasarkan pernyataan dari guru diatas menyatakan bahwa sekolah telah melaksanakan secara akuntabilitas atau bisa dipertanggung jawabkan. Hal ini dapat dilihat dari hasil laporan realisasi yang dipertanggung jawabkan kepada pemerintah tidak diketahui temuan oleh pihak BPK sebagai badan pengawas pemerintah.

Berdasarkan memperoleh data yang di didapatkan dari sebuah wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan untuk mengetahui tingkat responsibility di sekolah, yaitu Bapak Hasirullah sebagai Kepala tata usaha wawancara ini dilakukan disekolah menyatakan bahwa:

“Responsibiliti ini sesuai dengan peraturan pemerintah, sudah saya katakan diatas, bahwa sesuai peraturan pemerintah masalah anggaran ini. Jadi klo sudah sesuai oleh peraturan pemerintah bisa sudah dipertanggung jawabkan kepada pemerintah.”<sup>55</sup>

Pernyataan diatas dapat dijabarkan bahwa kepala TU menyatakan pihak sekolah telah melaksanakan responsibiliti yaitu sesuai peraturan

---

<sup>54</sup> Bapak Andi, *Wawancara Langsung*, 15 April 2022.

<sup>55</sup> Bapak Hasirullah, *Wawancara Langsung*, 08 April 2022.



perintah atas setiap pengajuan anggaran dan realisasi anggaran. Dan setiap laporannya bisa dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan memperoleh data yang di didapatakan dari sebuah wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan untuk mengetahui tingkat responsibility di sekolah, yaitu Ibu Desi selaku Bendahara wawancara ini dilakukan disekolah menyatakan bahwa:

“Sekolah selalu mengikuti aturan tentang prosedur pengelolaan keuangan yang sudah baku, artinya anggaran sekolah itu sudah ada namanya masing masing misal, 1 milyar untuk gaji guru, 1 milyar untuk gedung dll.”<sup>56</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dijabarkan bahwa bendahara sekolah setah melaksanakan pengelolaan dana anggaran sesuai dengan standart prosedur pengelolaan.

Berdasarkan memperoleh data yang di didapatakan dari sebuah wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan untuk mengetahui tingkat responsibility di sekolah, yaitu Bapak Andi sebagai Guru wawancara ini dilakukan disekolah menyatakan bahwa:

“Jawabnya sama diatas selama tidak ada temuan dari BPK yang diutus pemerintah dikatakan sesuai atauran dan bisa dipertanggung jawabkan.”<sup>57</sup>

Berdasarkan pernyataan pihak guru menyatakan bahwa pengelolaan anggaran dikatakan respondebiliti atau bisa dipertanggung jawabkan apabila tidak ada temuan dari badan pengawas pemerintah.

Berdasarkan memperoleh data yang di didapatakan dari sebuah wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan untuk

---

<sup>56</sup> Ibu Desi, *Wawancara Langsung*, 08 April 2022.

<sup>57</sup> Bapak Andi, *Wawancara Langsung*, 15 April 2022.

mengetahui tingkat Fairnes di sekolah, yaitu Bapak Hasirullah sebagai Kepala tata usaha wawancara ini dilakukan disekolah menyatakan bahwa:

Keadilan masalah keuangan ya, karena ini kan untuk kesejahteraan masyarakat disekolah ini baik, untuk pemenuh kebutuhan sekolah sebagai fasilitas untuk umum. Jadi karena laporan anggaran tadi ada yang privasi dan ada yang publik makanya data yang publik di berikan kepada guru-guru dan pihak yang lain yaitu data anggaran dan realisasi penggajian.<sup>58</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas yang telah dipaparkan oleh kepala TU bahwa keadilan keuanga telah dilaksanakan. Karena dibuktikan dengan kesejahteraan pihak sekolah, dan ketersediaanya fasilitas sekolah. Dan kepala TU menyatakan juga bahwa ada dua jenis laporan anggaran yaitu privasi dan publikasi. Maka anggaran yang untuk publikasi di publikasikan kepada pihak-pihak sekolah yaitu laporan anggaran penggajian.

Berdasarkan memperoleh data yang di didapatakan dari sebuah wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan untuk mengetahui tingkat fairnes di sekolah, yaitu Ibu Desi sebagai Bendahara wawancara ini dilakukan disekolah menyatakan bahwa:

“Saya mengeluarkan dana anggaran ini sudah adil, sesuai dengan data anggaraan saja, keadilan itu dirasa kemungkinan haya bagi setiap organisasi disekolah, seperti organisasi kesiswaan, dan kurikulum. Kedua oraganisasi ini setiap tahun harus mengajukan anggaran sesuai dengan kebutuhan organisasi itu. Maka jika anggaran yang diajukan berbeda kedua organisasi itu tidak boleh ada kecmburuaah, karena sudah sesuai dengan pengajuan. Jadi ketika pencairan dan BOS sebagai pemenuh kegiatan yang telah diajukan. Saya keluarkannya dana itu sesuai dengan pagunya saja. Jadi ketidak adilan sara rasa adil. Apalagi penggajian untuk guru, selalu saya terbuka untuk masalah laporan penggajian, jadi

---

<sup>58</sup> Bapak Hasirullah, *Wawancara Langsung*, 08 April 2022.

keadilan saya jung-jung tinggi untuk masalah keuangan sekolah.”<sup>59</sup>

Berdasarkan data hasil wawancara yang dilakukan oleh bendahara sekolah pengeluaran dana anggaran sudah dilaksanakan dengan adil sesuai dengan pagu anggran yang telah di anggarkan. Karena setiap pagu organisasi memiliki pagu anggran berbeda-beda. Maka anggaran yang dikeluarkan sesuai dan tidak ada rasa ketidakadilan diantara setiap organisasi maupun kegiatan yang terlaksana.

Berdasarkan memperoleh data yang di didapatkan dari sebuah wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan untuk mengetahui tingkat transparansi di sekolah, yaitu Bapak Andi sebagai Guru wawancara ini dilakukan disekolah menyatakan bahwa:

“Saya rasa keadilah hanya sepengetahuan di penggajian, karena penggajian itu sudah ada peraturan pemerintah yang ngatur sesuai golongan, jadi saya rasa penggajian itu sudah adil. Kemungkinan hanya ada beberapa yang belum juga ada rasa ketidakadilan yang itu ketika terjadinya kegiatan yang ada honorariumnya disitu, kadang belum juga terbayarkan dan jumlah juga tidak sesuai menurut saya. Kemungkinan karena saya sebagai pihak internal sekolah. Dan saya juga gk paham masalah yang lainnya.”<sup>60</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas dinyatakan oleh seorang guru bahwa keadilan yang dirasakan hanya penggajian, karena penggajian itu sudah diatur oleh standart pemerintah sesuai dengan golongan atau kepangkatan guru, maka sekolah sudah menyesuaikan dengan standrt pemerintah. Tetapi dinyatakan juga ketidakadilan ketika pemberian honor kegiatan yang masih belum terbayar dan tidak sesuai dengan

---

<sup>59</sup> Ibu Desi, *Wawancara Langsung*, 08 April 2022.

<sup>60</sup> Bapak Andi. *Wawancara Langsung* 15 April 2022

pekerjaannya. Hal ini dianggap karena sangguru pihak internal sekolah yang mungkin bisa merelakan atau mengiklaskan setiap kegiatan tanpa diberikan honorarium.

## **B. Temuan Penelitian**

Beberapa wawancara dan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di MAN 2 Pamekasan yang memenuhi triangulasi dan tahapan analisis data, peneliti menemukan beberapa temuan penelitian dari paparan data di atas yaitu antara lain

### **1. Pengelolaan Anggaran Sekolah Dengan *Good School Governance* di MAN 2 Pamekasan**

Sekolah dituntut untuk melaksanakan pengelolaan sekolah secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja sekolah dalam pencapaian tujuan pendidikan, yang hasilnya bisa dilihat dari kinerja yang berhasil dicapai oleh sekolah. Sekolah telah melakukan pengelolaan atau telah memanajemen dengan baik bukti dari pengelolaan sekolah yang baik sekolah telah mencapai sebuah tujuannya yaitu dengan mendapatkan predikat A dalam penilaian akreditasi sekolah, dan juga sekolah menyandang predikat sebagai sekolah adiwiyata. Penilaian akreditasi yang dilakukan ini merupakan semua item indikator sekolah baik secara internal maupun eksternal sekolah. Maka pengelolaan sekolah yang baik apabila pihak pengelola dapat memanajemen sekolah dengan efektif dan efisien mungkin agar tujuan sekolah tercapai. Maka hal ini dinyatakan sekolah telah memenuhi standart peraturan pemerintah tentang pengelolaan sekolah

dengan baik. Penentu pengelolaan sekolah yang baik bukan dari sekolah yang menentukan, melainkan pembuat regulasi yang menentukan, diantaranya dirjen anggatan, dari kementerian agama provinsi, dan dari kementerian agama pusat. Pengelolaan sekolah sekarang sudah menggunakan sistem secara komputerisasi atau bisa disebut aplikasi yang dibuat oleh pemerintah. Sehingga semua pengelolaan sudah sesuai dengan regulator atau aturan pemerintah. Pengelolaan sekolah diantaranya ada pengelolaan administrasian sekolah.

Pengelolaan sekolah hal yang paling menjadi resiko terbesar adalah pengelolaan anggaran sekolah. Maka pengelolaan anggaran merupakan pengelolaan yang menjadi tanggung jawab besar dan memiliki resiko tinggi . hal ini dikarenakan jumlah anggaran sekolah ini sangatlah besar, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah diantaranya pemenuh kebutuhan sarana dan prasarana, administrasi sekolah dan kegiatan belajar mengajar yang akan dilaksanakan disekolah pada periode satu tahun mendatang. Anggaran sudah harus dibuat sebelum tahun anggaran terlaksana, semua kebutuhan sekolah harus terpenuhi. Sumber dana anggaran yaitu hanya dari sumber yaitu dari sumber dana Bantuan Operasional Sekolah.

Dana Bantuan Operasional sekolah tersebut diberikan kepada sekolah untuk dikelola dan menjadi tanggung jawab sekolah sepenuhnya. Sekolah harus mampu mengelola dana operasional sekolah efektif dan efisien mungkin. Agar besaran usulan dana

anggaran yang telah diusulkan yang turunya berupa dan bantuan operasional sekolah harus mampu di gunakan sepenuhnya atau realisasi penuh. Untuk mengetahui tingkat kinerja dari anggaran sekolah. Sekolah jika pengelolaan anggaran keuangan sekolah sudah sesuai standart *good school governance*. Karena sistem keuangan yang berlaku didalam sekolah sudah diatur oleh pemerintah yaitu menggunakan aplikasi komputerisasi.

Dapat disimpulkan semua keuangan sudah sesuai dengan standart regulasi pemerintah. Sekolah telah mengikuti prosedur pengelolaan keuangan yang sudah baku sesuai pagu anggaran masing-masing yang telah dianggarkan. Pihak sekolah hanya sebagai pengelola. Semua anggran sudah sesuai dengan kebutuhan sekolah. Tetapi pada tahun 2021 ada beberapa anggaran yang harus direvisi dikarenakan anggaran yang awalnya di pagukan pada kegiatan ekstrakurikuler, direvisi sesuai pertauran pemerintah, bahwa sekolah tidak boleh melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler selama pandemi COVID 19. Maka anggaran kegiatan ekstrakurikuler digantikan pada anggaran pengadaan handsanitizer.

## **2. Faktor yang Menjadikan Sekolah Sebagai *Good School Governance* dalam Pengelolaan Anggaran Sekolah di MAN 2 Pamekasan**

Setiap sekolah dituntut untuk melaksanakan tata kelola sekolah dengan baik jadi bisa dikatakn sekolah itu sesuai dengan standart *Good School Governance* (GSG) yang merupakan sebuah perangkat pendukung untuk membentuk sebuah sekolah dengan tata kelola yang

baik. standart *Good School Governance* (GSG) terdapat tiga prinsip tata kelola sekolah yang baik yaitu *independensi, transparansi, akuntabilitas, responsibility, dan fairness.*

**a. Independensi**

Sekolah sudah mematuhi peraturan pemerintah sesuai standat. Sekolah sudah sepenuhnya masih belum dikatakan mandiri, karena sekolah masih tergantung pada dan BOS sepenuhnya, sekolah belum memiliki pendapatan sekolah. Karena sekolah yang sumbernya dari BOS, maka pencairan dana BOS tidak begitu efektif, jadi jika dana BOS belum turun juga, bendahara dan kepala sekolah selalu menalangi dana untuk lancarnya kegiatan di sekolah. Karena sekolah merupakan pelayanan publik yang harus memberikan pelayanan kepada masyarakat maka seluruh kebutuhan masyarakat harus dipenuhi.

**b. Transparansi**

Transparansi di sekolah merupakan keterbukaan informasi anggaran sekolah, sekolah sudah merealisasikan anggaran dan data anggarannya, ada dua versi anggaran yaitu versi publikasi dan privasi. Untuk publikasi itu memang dibuat sesuai dengan realisasi sesuai dengan pagu anggaran. Tetapi pihak sekolah sangat tertutup dengan realisasi anggaran yang sebenarnya. Pihak guru hanya diberi keterbukaan anggaran pada pengeluaran gaji. Jadi tidak semua

realisasi anggaran di publikasikan atau transparan kepada publik. Pihak guru tidak mengetahui jumlah anggaran dan realisasi anggaran. Sehingga tidak bisa mengetahui pencapaian anggaran yang telah dilaksanakan.

**c. Akuntabilitas**

Sekolah telah melaksanakan akuntabilitas sesuai dengan pagu anggaran. Hal ini dapat diketahui dari realisasinya dana bos, karena jika dana bos tidak teralisasi semuanya maka pemerintah menilai kinerja sekolah tidak bagus dan akan mengurangi anggaran pada periode berikutnya. Bagian keuangan sekolah diantaranya bendahara sekolah sebagai pengelola anggaran sekolah telah bertanggung jawab atas setiap dana keuangan sekolah. Bendahara juga menyatakan tidak pernah melakukan penyelewengan atas dana tersebut. Bagian bendahara telah melakukan sesuai pekerjaannya yaitu mengeluarkan dana sesuai dengan data di anggaran sekolah. Sekolah telah melaksanakan secara akuntabilitas atau bisa dipertanggung jawabkan. Hal ini dapat dilihat dari hasil laporan realisasi yang dipertanggung jawabkan kepada pemerintah tidak diketahui temuan oleh pihak BPK sebagai badan pengawas pemerintah.

**d. Responsibiliti**

Sekolah telah melaksanakan responsibiliti yaitu sesuai peraturan perintah atas setiap pengajuan anggaran dan



realisasi anggaran. Dan setiap laporannya bisa dipertanggung jawabkan. Bendahara sekolah setelah melaksanakan pengelolaan dana anggaran sesuai dengan standart prosedur pengelolaan. Pengelolaan anggaran dikatakan bertanggung jawab atau bisa dipertanggung jawabkan apabila tidak ada temuan dari badan pengawas pemerintah.

**e. Fairnes**

Keadilan keuangan telah dilaksanakan. Karena dibuktikan dengan kesejahteraan pihak sekolah, dan ketersediaan fasilitas sekolah. Sekolah membuat laporan realisasi anggaran dengan model terbuka dan privasi. Maka anggaran yang untuk publikasi di publikasikan kepada pihak-pihak sekolah yaitu laporan anggaran penggajian. Bagian bendahara sekolah pengeluaran dana anggaran sudah dilaksanakan dengan adil sesuai dengan pagu anggaran yang telah di anggarkan. Karena setiap pagu organisasi memiliki pagu anggaran berbeda-beda. Maka anggaran yang dikeluarkan sesuai dan tidak ada rasa ketidakadilan diantara setiap organisasi maupun kegiatan yang terlaksana. Keadilan yang dirasakan hanya penggajian, karena penggajian itu sudah diatur oleh standart pemerintah sesuai dengan golongan atau kepangkatan guru, maka sekolah sudah menyesuaikan dengan standart pemerintah. Tetapi dinyatakan juga ketidakadilan ketika pemberian honor kegiatan yang

masih belum terbayar dan tidak sesuai dengan pekerjaannya. Hal ini dianggap karena sangguru pihak internal sekolah yang mungkin bisa merelakan atau mengiklaskan setiap kegiatan tanpa diberikan honorarium.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Pengelolaan Anggaran Sekolah Dengan *Good School Governance* Di MAN 2 Pamekasan**

Sekolah dituntut untuk melaksanakan pengelolaan sekolah secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja sekolah dalam pencapaian tujuan pendidikan, yang hasilnya bisa dilihat dari kinerja yang berhasil dicapai oleh sekolah.<sup>61</sup> Berdasarkan hasil temuan menyatakan bahwa telah melaksanakan kinerja sekolah dengan baik yaitu dengan dicerminkan oleh pengelolaan sekolah yang baik dengan dibuktikan dengan pencapaian sekolah dengan mendapatkan predikat A dalam penilaian akreditasi sekolah, dan juga sekolah menyandang predikat sebagai sekolah adiwiyata. Penilaian akreditasi yang dilakukan ini merupakan semua item indikator sekolah baik secara internal maupun eksternal sekolah. Sekolah yang harus memberikan pelayanan kepada masyarakat dimana masyarakat yang harus dipenuhi, jika sekolah tidak mencerminkan pencapaiannya maka masyarakat tidak akan mempercayai sekolah. Sesuai dengan landasan teori agensi yang telah di paparkan bahwa Teori agensi berisi hubungan kontraktual antara dua pihak yaitu agen

---

<sup>61</sup> Hutagalung, *Tata Kelola Pendidikan Pada Daerah Atonomi Baru*.

dan prinsipal, dimana principle sebagai organisasi sektor publik menunjuk kinerja bagus atau pencapaian maksimal dan agen sebagai pengguna dari pelayanan principle.<sup>62</sup> Pelayanan yang efektif dalam pencapaian tujuan sekolah yaitu dengan adanya kontrol dari masyarakat dan dari pemerinta, dan terpenting adalah pengelolaan sekolah menjadi akuntabel, transparan dan demokrasi dalam pengelolaan sekolah.<sup>63</sup> Maka dengan ini sekolah untuk mencapai suatu tujuan untuk yang telah dijadikan sasaran sekolah yaitu dengan tetap berkomitmen untuk tetap melaksanakan pengelolaan sekolah dengan baik.

Selain itu dalam pengelolaan Anggaran pihak sekolah tentunya harus mengacu pada prinsip good school governance yaitu:

a) Tranparansi

Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.<sup>64</sup>

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Arwildayanto bahwasanya tranparansi merupakan keterbukaan dalam

---

<sup>62</sup> Siallagan, *Buku Teori Akuntansi Edisi Pertama*.

<sup>63</sup> Saleh, "Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Kepala Sekolah Dengan Partisipasi Anggaran Sebagai Variabel Intervening ( Studi Pada SMAN Di Kabupaten Wajo )."

<sup>64</sup> Saleh.

pengelolaan suatu kegiatan di Lembaga Pendidikan atau sekolah, seperti halnya dalam pengelolaan Anggaran.

Dengan adanya keterbukaan dalam pengelolaan Anggaran dapat memudahkan pihak-pihak yang bersangkutan untuk mengetahui.<sup>65</sup>

Sebagaimana hal tersebut ditambah oleh Kiftiah Maries yang menyatakan bahwa transparansi sangat urgen dalam meningkatkan kepercayaan terhadap sekolah. Selain itu pelaksanaan prinsip transparansi dapat mencegah adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin bisa terjadi nanti.<sup>66</sup>

#### b) Akuntabilitas

Akuntabilitas harus melaksanakan program-program sekolah yang bisa dipertanggung jawabkan sesuai dengan anggaran sekolah.<sup>67</sup>

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Arwildayanto bahwasanya akuntabilitas merupakan kondisi yang dinilai oleh orang lain sebab kualitas perinformasinya dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi

---

<sup>65</sup> Arwildayanto. *Manajemen Keuangan Dan Pembiayaan Pendidikan*. Edited by Ujang Kuswandi. Jawa Barat: Ikapi Jabar, 2017.

<sup>66</sup> Novie Kiftiah Maries, dkk, "Menelaah Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pada Yayasan Pendidikan Full Day Mardlatul Singaraja", *Jurnal S1 Ak*, Vol. 7, No. 1, 2017, 2-5

<sup>67</sup> Saleh, "Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Kepala Sekolah Dengan Partisipasi Anggaran Sebagai Variabel Intervening ( Studi Pada SMAN Di Kabupaten Wajo )."

tanggung jawabnya. Dalam pengelolaan anggaran akuntabilitas ialah penggunaan uang sekolah yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan perencanaan serta kebutuhan Pendidikan yang telah ditetapkan.<sup>68</sup>

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Ema Fitriatun bahwasanya akuntabilitas itu sendiri mengandung kewajiban menurut undang-undang untuk melayani atau memfasilitasi pengamat independent yang memiliki hak untuk melaporkan temuan atau suatu instansi pemerintah diwajibkan untuk menyajikan dan melaporkan serta dapat mempertanggung jawabkan segala kegiatannya terutama dibidang administrasi keuangan agar dapat diketahui pertanggungjawabannya kepada publik.<sup>69</sup>

#### c) Responsibility

Responsibility yang merupakan pertanggung jawaban organisasi sektor publik adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan organisasi sektor publik terhadap prinsip pemerintah yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.<sup>70</sup>

#### c) Independensi

---

<sup>68</sup> Arwildayanto. *Manajemen Keuangan Dan Pembiayaan Pendidikan*. Edited by Ujang Kuswandi, Jawa Barat: Ikapi Jabar, 2017.

<sup>69</sup> Erna Fitriatun, "Akuntabilitas Publik," *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53 no.9 (2019): 1689-1699

<sup>70</sup> Kusmayadi, "Fakultas Ekonomi, Universitas Siliwangi

Independensi merupakan suatu keadaan dimana sekolah dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip organisasi yang sehat.<sup>71</sup>

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Mulyadi bahwasanya independensi merupakan sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain dan tidak bergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam pengelolaan Anggaran dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak pada satu orang dalam mengelola Anggaran sesuai dengan peraturan yang ada.<sup>72</sup>

Hal ini juga dijelaskan Murisna bahwasanya independensi adalah keadaan dimana sekolah dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Konsep ini mendorong sekolah untuk profesional dalam mengelola bisnis

---

<sup>71</sup> Ibid

<sup>72</sup> Marieta, dkk, “*Pengaruh Kompetensi, Independensi Dan Pengalaman Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat Kota Tomohon Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah*”. *Jurnal Accountability*, Vol. 2, No.1, 2013 hal 154

sehingga tidak terjadi konflik kepentingan, bisa menciptakan kemandirian dan tidak dapat diintervensi oleh pihak mana pun. Selain itu, sekolah juga harus mampu menciptakan nilai-nilai (*values*) agar dapat menciptakan daya asing.<sup>73</sup>

d) Fairnes

Merupakan perlakuan yang adil dan setara didalam memenuhi hak-hak stackholder yang timbul berdasarkan perjanjian setara peraturan perundangan yang berlaku.<sup>74</sup>

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Murisna fairnes adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stackholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Konsep ini menuntut hadirnya perlakuan yang adil dan bijaksana dalam rangka memenuhi hak-hak stackholder yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adil. Prinsip ini diharapkan dapat mendorong sekolah untuk memberikan jaminan perlakuan adil terhadap pihak-pihak para pemangku kepentingan.<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup> Murisna, Dkk, “Analisis Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Dasar Di Kabupaten Luwu.”

<sup>74</sup> Fauzan, “Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Perilaku Etis Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah.”

<sup>75</sup> Murisna Dkk, “Analisis Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Dasar Di Kabupaten Luwu.”

Pemerintah telah membuatkan standart peraturan untuk pengelolaan sekolah yang diatur dalam undang-undang yang menyatakan standart nasional pendidikan terdiri dari standart isi, proses, kompetensi lulusan , tenaga kependidikan, sara dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditindakan secara berencana dan berkala.<sup>76</sup> Sekolah telah memenuhi standart peraturan pemerintah tentang pengelolaan sekolah dengan baik. Penentu pengelolaan sekolah yang baik bukan dari sekolah yang menentukan, melainkan pembuat regulasi yang menentukan, diantaranya dirjen anggaran, dari kementerian agama provinsi, dan dari kementerian agama pusat. Dalam sistem pendidikan nasional terdapat subsistem yang perlu dikembangkan untuk mencapai pendidikan nasional terpercaya dimasyarakat yaitu tata kelola sekolah yang baik.<sup>77</sup> Pengelolaan sekolah MAN 2 Pamekasan sekarang sudah menggunakan sistem secara komputerisasi atau bisa disebut aplikasi yang dibuat oleh pemerintah. Sehingga semua pengelolaan sudah sesuai dengan regulator atau aturan pemerintah. Pengelolaan sekolah diantaranya ada pengelolaan administrasian sekolah dan beberapa standar penilaian dari sekolah.

Dalam menjalankan perannya sebagai lembaga pendidikan, sekolah harus dikelola dengan memegang teguh prinsip *good governance* agar dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang telah dirumuskan dengan optimal, pengelolaan yang tidak profesioal dapat menjadikan resiko dalam dunia pendidikan, hal yang sangat menjadi resiko adalah pengelolaan anggaran.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> Undang-undang No 20 Tahun 2003 “Sistem pendidikan nasional,” n.d.

<sup>77</sup> Dedi dkk Kusmayadi, “Fakultas Ekonomi, Universitas Siliwangi” 62, no. 2011 (n.d.): 1–15.

<sup>78</sup> Endin, *Manajemen Anggaran Pendidikan*.



Memang menjadi temuan dalam penelitian bahwa Pengelolaan sekolah hal yang paling menjadi resiko terbesar adalah pengelolaan anggaran sekolah. Maka pengelolaan anggaran merupakan pengelolaan yang menjadi tanggung jawab besar dan memiliki resiko tinggi. hal ini dikarenakan jumlah anggaran sekolah ini sangatlah besar, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah diantaranya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana, administrasi sekolah dan kegiatan belajar mengajar yang akan dilaksanakan disekolah pada periode satu tahun mendatang. Anggaran sudah harus dibuat sebelum tahun anggaran terlaksana, semua kebutuhan sekolah harus terpenuhi. Sumber dana anggaran yaitu hanya dari sumber yaitu dari sumber dana Bantuan Operasional Sekolah.

Sekolah yang dalam operasioanl penyelenggaraan pendidikan masih didanai oleh bantuan operasional sekolah.<sup>79</sup> Dana Bantuan Operasional sekolah MAN tersebut diberikan kepada sekolah untuk dikelola dan menjadi tanggung jawab sekolah sepenuhnya. Program bantuan operasioanl sekolah merupakan program nasional dibidang pendidikan yang menyerap anggaran besar yang harus berhubungan langsung dengan masyarakat luas, maka pengelolaannya harus se efektif dan maksimal mungkin.<sup>80</sup> Sekolah MAN 2 Pamekasan mampu mengelola dana operasional sekolah efektif dan efisien. Agar besaran usulan dana anggaran yang telah diusulkan yang turunya berupa dan bantuan operasional sekolah harus mampu di gunakan

---

<sup>79</sup> Laksmi Mahendrati Dwiharja, “*Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparasi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah (APBS) Terhadap Partisipasi Komite Sekolah.*”

<sup>80</sup> Murisna Dkk, “*Analisis Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Dasar Di Kabupaten Luwu.*”

sepenuhnya atau realisasi penuh. Untuk mengetahui tingkat kinerja dari anggaran sekolah. Sekolah jika pengelolaan anggaran keuangan sekolah sudah sesuai standart *good school governance*. Karena sistem keuangan yang berlaku didalam sekolah sudah diatur oleh pemerintah yaitu menggunakan aplikasi komputerisasi. Dapat disimpulkan semua keuangan sudah sesuai dengan standart regulasi pemerintah.

Sekolah telah mengikuti prosedur pengelolaan keuangan yang sudah baku sesuai pagu anggaran masing-masing yang telah dianggarkan, pihak sekolah hanya sebagai pengelola. Semua anggran sudah sesuai dengan kebutuhan sekolah. Tetapi pada tahun 2021 ada beberapa anggaran yang harus direvisi dikarenakan anggaran yang awalnya di pagukan pada kegiatan ekstrakurikuler, direvisi sesuai pertauran pemerintah, bahwa sekolah tidak boleh melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler selama pandemi COVID 19. Maka anggaran kegiatan ekstrakurikuler digantikan pada anggaran pengadaan untuk kebutuhan pandemi Covid -19.

## **2. Faktor yang Menjadikan Sekolah Sebagai *Good School Governance* dalam Pengelolaan Anggaran Sekolah di MAN 2 Pamekasan**

### **a) Faktor Independensi**

Setiap sekolah dituntut untuk melaksanakan tata kelola sekolah dengan baik jadi bisa dikatakn sekolah itu sesuai dengan standart *Good School Governance* (GSG) yang merupakan sebuah perangkat pendukung untuk membentuk sebuah sekolah dengan tata kelola yang baik. standart *Good School Governance* (GSG) terdapat tiga prinsip tata kelola sekolah yang baik yaitu *independensi*,

*transparansi, akuntabilitas, responsibility, dan fairness.*<sup>81</sup> Faktor penerapan *Good School Governance* yaitu dengan independensi, independensi merupakan suatu keadaan dimana sekolah dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip organisasi yang sehat.<sup>82</sup>

Sekolah sudah mematuhi peraturan pemerintah sesuai standat. Sekolah sudah sepenuhnya masih belum dikatakan mandiri, karena sekolah masih tergantung pada dana BOS sepenuhnya, sekolah belum memiliki pendapatan sekolah. Setiap sekolah harus bisa mengimplementasikan dengan baik kinerja dana pendidikan, karena sumber dana pendidikan satu-satunya dari dana BOS, yang sumbernya juga dari APBD.<sup>83</sup>

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara umum bertujuan untuk membantu pendanaan biaya operasi dan nonpersonalia sekolah, meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah. Secara khusus bertujuan untuk membebaskan pungutan peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu.<sup>84</sup>

---

<sup>81</sup> Susanti, "Penerapan *Good School Governance (GSG)* Dan Pengaruhnya Terhadap Efektifitas Pengelolaan Bantuan Operasional (BOS) Sekolah Dasar Kota Blitar."

<sup>82</sup> Kusmayadi, "Fakultas Ekonomi, Universitas Siliwangi." 62, no.2011

<sup>83</sup> Sangganagara, *Implementasi Kebijakan Alokasi Anggaran Pendidikan.*

<sup>84</sup> Murisna, Dkk, "Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Dasar Di Kabupaten Luwu."

Sasaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yaitu sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau masyarakat penyelenggara pendidikan yang telah terdata dalam dapodik. Bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat telah memiliki izin operasional.

Sekolah MAN 2 Pamekasan yang sumbernya dari BOS, maka pencairan dana BOS tidak begitu efektif, jadi jika dana BOS belum turun juga, bendahara dan kepala sekolah selalu menalangi dana untuk lancarnya kegiatan di sekolah. Pengelolaan dana BOS tidak terlepas dari kepala sekolah dalam mengatur alokasi pembiayaan untuk operasional sekolah, pengelolaannya ini akan berpengaruh langsung terhadap mutu pendidikan sekolah yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat.<sup>85</sup> Dana BOS Karena sekolah merupakan pelayanan publik yang harus memberikan pelayanan kepada masyarakat maka seluruh kebutuhan masyarakat harus di penuhi.

Jadi dapat disimpulkan bahwa sekolah MAN 2 Pamekasan belum melaksanakan faktor GSG dengan independensi, karena sekolah masih bergantung pada pemerintah dalam sumber pendanaannya. Karena sekolah belum bisa mendapatkan penghasilan sendiri. Dan hanya dengan mengoptimalkan dana BOS sekolah yang setiap tahunnya di berikan melalui pagu anggaran yang telah diusulkan.

---

<sup>85</sup> Fauzan, "Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Perilaku Etis Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah."

## b) Faktor Transparansi

Faktor penerapan *Good School Governance* yaitu dengan transparansi, transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.<sup>86</sup> Transparansi di sekolah MAN 2 Pamekasan merupakan keterbukaan informasi anggaran sekolah, sekolah sudah merealisasikan anggaran dan data anggarannya, ada dua versi anggaran yaitu versi publikasi dan privasi. Transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai dan bisa dipertanggung jawabkan oleh pihak pengelola anggaran.<sup>87</sup>

Publikasi atau keterbukaan informasi pengelolaan dan anggaran sekolah itu memang dibuat sesuai dengan realisasi sesuai dengan pagu anggaran. Tetapi pihak sekolah sangat tertutup dengan realisasi anggaran yang sebenarnya. Pihak guru hanya diberi keterbukaan anggaran pada pengeluaran penggajian. Jadi tidak semua realisasi anggaran di publikasikan atau transparan

---

<sup>86</sup> Saleh, "Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Kepala Sekolah Dengan Partisipasi Anggaran Sebagai Variabel Intervening ( Studi Pada SMAN Di Kabupaten Wajo )."

<sup>87</sup> Susanti, "Penerapan *Good School Governance (GSG)* Dan Pengaruhnya Terhadap Efektifitas Pengelolaan Bantuan Operasional (BOS) Sekolah Dasar Kota Blitar."

kepada publik. Pihak guru tidak mengetahui jumlah anggaran dan realisasi anggaran. Sehingga tidak bisa mengetahui pencapaian anggaran yang telah dilaksanakan.

Dapat disimpulkan bahwa faktor GSG yang berupa transparansi di sekolah MAN 2 Pamekasan masih tidak sepenuhnya ada keterbukaan, karena pengelolaan yang outputnya berupa laporan realisasi anggaran ada dua versi yaitu untuk publikasi dan untuk privasi atau tertutup. Maka secara penuh laporan realisasi anggaran belum sebenarnya transparan.

**c) Akuntabilitas**

Faktor penerapan *Good School Governance* yaitu dengan akuntabilitas, akuntabilitas harus melaksanakan program-program sekolah yang bisa dipertanggung jawabkan sesuai dengan anggaran sekolah.<sup>88</sup> Sekolah telah melaksanakan akuntabilitas sesuai dengan pagu anggaran. Hal ini dapat diketahui dari realisasinya dana bos, karena jika dana bos tidak teralisasi semuanya maka pemerintah menilai kinerja sekolah tidak bagus dan akan mengurangi anggaran pada periode berikutnya. Barometer terhadap efektifitas manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan dapat dilihat dari kualitas program yang dibiaya, ketepatan pembiayaan, kepuasan pembiayaan keluwesan proses pembiayaan adaptasi dengan regulasi dan kebijakan yang

---

<sup>88</sup> Saleh, "Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Kepala Sekolah Dengan Partisipasi Anggaran Sebagai Variabel Intervening ( Studi Pada SMAN Di Kabupaten Wajo )."

memungkinkan penggalan dana yang lebih maksimal, agar bisa termotivasi ketercapaian suatu tujuan pendidikan.<sup>89</sup> Bagian keuangan sekolah diantaranya bendahara sekolah sebagai pengelola anggaran sekolah telah bertanggung jawab atas setiap dana keuangan sekolah. Bendahara juga menyatakan tidak pernah melakukan penyelewengan atas dana tersebut. Bagian bendahara telah melakukan sesuai pekerjaannya yaitu mengeluarkan dana sesuai dengan data anggaran sekolah.

Melihat pentingnya perencanaan anggaran ini sudah seharusnya organisasi perlu memperhatikan arahan masukan dan situasi yang ada, hal ini tidak terlepas kontribusi berbagai pihak, sehingga nantinya realisasi anggaran dapat berjalan sesuai dengan fungsinya dan bisa di pertanggung jawabkan.<sup>90</sup> Hal ini dapat dilihat dari hasil laporan realisasi yang dipertanggung jawabkan kepada pemerintah tidak diketahui temuan oleh pihak BPK sebagai badan pengawas pemerintah.

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa pertanggung jawaban sekolah MAN 2 Pamekasan telah bisa dipertanggung jawabkan atau bisa secara akuntabilitas karena sampai saat ini belum ada temuan dari pemerintah dan sampai saat ini masih dikatagorikan sebagai sekolah yang selalu memenuhi standart pertauran pemerintah.

---

<sup>89</sup> Dkk, *Manajemen Keuangan Dan Pembiayaan Pendidikan*.

<sup>90</sup> Angwarmase, *Perencanaan Anggaran Pendidikan*.

#### d) Responsibility

Faktor penerapan *Good School Governance* yaitu dengan responsibility, responsibility yang merupakan pertanggung jawaban organisasi sektor publik adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan organisasi sektor publik terhadap prinsip pemerintah yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.<sup>91</sup> Sekolah MAN 2 Pamekasan telah melaksanakan responsibiliti yaitu sesuai peraturan perintah atas setiap pengajuan anggran dan realiasai anggaran. Dan setiap laporannya bisa dipertanggung jawabkan. Penerapan prinsip responsibility setiap anggota selalu dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang dihadapi organisasi sesuai peraturan yang ada.<sup>92</sup> Bendahara sekolah MAN 2 Pamekasan sebagai anggota organisasi yang bertanggung jawab ata pengelolaan anggaran telah melaksanakan pengelolaan dana anggaran sesuai dengan standart prosedur pengelolaan. Pengelolaan anggran dikatakan respondibeliti atau bisa dipertanggung jawabkan apabila tidak ada temuan dari badan pengawas pemerintah.

Maka dapat disimpulkan pengelolaan anggaran selalu melibatkan beberapa anggota yang bisa mempertanggung jawabkan pengelolaan anggaran. Seperti bendahara, kepala TU,

---

<sup>91</sup> Kusmayadi, "Fakultas Ekonomi, Universitas Siliwangi."

<sup>92</sup> Maulamin, Cholik, and Alawiah, "*Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pengelolaan Anggaran Pada Instansi Pemerintah ( Studi Pada Dinas Pengelolaan Keuangan , Pendapatan Dan Aset Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten )*."



dan kepala sekolah sebagai kuasa pengguna anggaran, semua pengelolaan harus bisa dipertanggung jawabkan.

**e) Fairnes**

Faktor penerapan *Good School Governance* yaitu dengan fairnes merupakan perlakuan yang adil dan setara didalam memenuhi hak-hak stack holder yang timbul berdasarkan perjanjian setara peraturan perundangn yang berlaku.<sup>93</sup> Sekolah Man 2 Pamekasan memberlakukan keadilan keuanga dan telah dilaksanakan. Karena dibuktikan dengan kesejahteraan pihak sekolah, dan ketersediaanya fasilitas sekolah.

Dalam melaksanakan GSG pemerintah harus senantiasa memperhatikan kepentingan umum dan pemangku kepenmtingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan, kewajaran disini berkaitan dengan keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak masyarakat yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>94</sup> Bagian bendahara sekolah sebagai pengelolaa keuangan yang telah menjadi bagian dari pemerintah yang harus melaksanakan kewajaran dan keadilan dalam keuangan sekolah yaitu setiap pengeluaran dana anggran sudah dilaksanakan dengan adil sesuai

---

<sup>93</sup> Fauzan, “*Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Perilaku Etis Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah.*”

<sup>94</sup> Maulamin, Cholik, and Alawiah, “*Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pengelolaan Anggaran Pada Instansi Pemerintah ( Studi Pada Dinas Pengelolaan Keuangan , Pendapatan Dan Aset Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten ).*”

dengan pagu anggaran yang telah di anggarkan oleh pihak sekolah MAN 2 Pamekasan. Karena setiap pagu organisasi memiliki pagu anggaran berbeda-beda. Maka anggaran yang dikeluarkan sesuai dan tidak ada rasa ketidakadilan diantara setiap organisasi maupun kegiatan yang terlaksana.

Ada juga hal yang selaras dengan pernyataan yang telah dikemukakan bahwa keadilan yang dirasakan hanya penggajian, karena penggajian itu sudah diatur oleh standart pemerintah sesuai dengan golongan atau kepangkatan guru, maka sekolah sudah menyesuaikan dengan standart pemerintah. Tetapi dinyatakan juga ketidakadilan ketika pemberian honor kegiatan yang masih belum terbayar dan tidak sesuai dengan pekerjaannya. Hal ini dianggap karena sangguru pihak internal sekolah yang mungkin bisa merelakan atau mengiklaskan setiap kegiatan tanpa diberikan honorarium.